

Mendagri, H. Moh. Ma'ruf

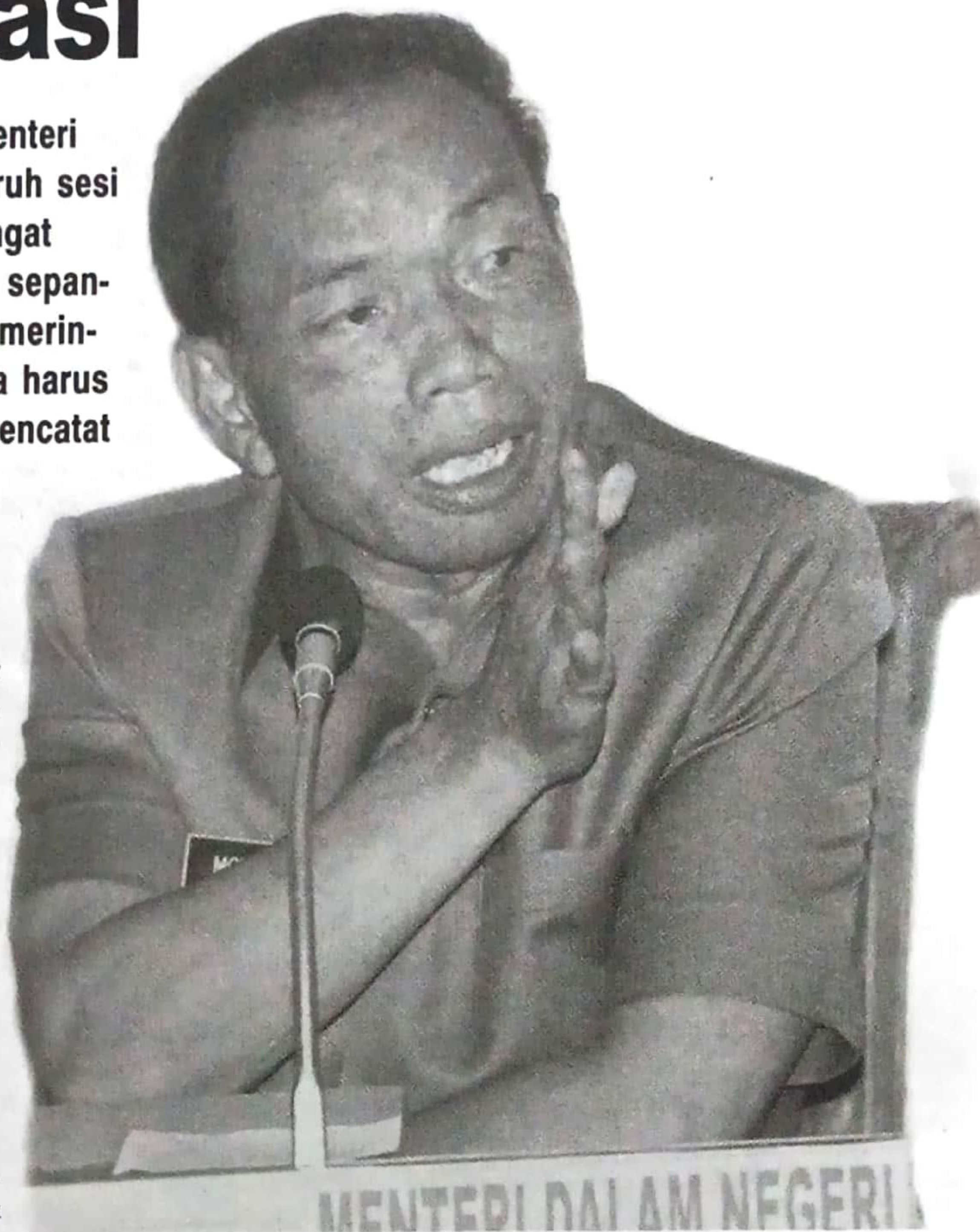
Koordinasi Menuju Harmonisasi

Pertama di Indonesia. Seorang Menteri Dalam Negeri, memoderatori seluruh sesi sebuah rapat kerja. "Raker ini sangat penting, dan baru pertama terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga saya harus mengikuti secara cermat untuk mencatat kekurangan dan kelebihan, guna perbaikan ke depan," ujar Mendagri Moh. Ma'ruf.

Dijumpai di kamar 1112 Hotel Ritzy Manado, tempat Raker digelar, Mendagri mengatakan, dari ketekunannya mengikuti seluruh sesi, ia bisa mengatakan, secara substansial, semua materi yang diberikan Menko Polhukam, Menko Ekuin, dan Menko Kesra beserta jajarannya, serta Menteri PU dan deputi Menkes, bersifat regulatif, dan itu sangat bagus. Meski bersifat makro, tetapi ia menilai, semua materi yang disampaikan para Menko dan para menteri, sangat dibutuhkan oleh para kepala daerah.

Raker Regional Timur yang diikuti 262 peserta, terdiri atas 11 gubernur (hadir 10), 101 Bupati, 19 Walikota, 11 Ketua DPRD Provinsi, 101 Ketua DPRD Kabupaten, dan 19 Ketua DPRD Kota itu diakui Mendagri, juga menyisakan kekurangan. Satu hal yang mencolok adalah pada keterbatasan waktu.

"Karenanya, tidak ada kesempatan tanya-jawab. Meski begitu, saya sudah menyebar kuisisioner untuk mereka. Dari kuisisioner itu saya berharap dapat masukan, untuk perbaikan penyelenggaraan Raker ke depan. Mungkin belum bisa langsung diterapkan di rapat sejenis di Denpasar untuk wilayah Indonesia Tengah dan di Batam untuk wilayah Indonesia Barat. Tapi setidaknya, saya akan mengadakan rapat seperti ini sekitar akhir tahun 2006, untuk melihat sejauh mana implementasi dari hasil Raker ini," ujar purnawirawan Letnan Jenderal TNI itu.



Mendagri, Moh. Ma'ruf

Sebab, *output* dari Raker ini, diharapkan sebuah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2007. Karena itu, Mendagri akan mencermati setiap persoalan yang ada di daerah. Jika terdapat kendala, ia juga akan melihat, apakah kendala tadi bersifat instrumental, atau karena tataran di lapangan. Sebab ada kalanya, kata "koordinasi" hanya mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan.

Padahal, kunci keberhasilan suatu tugas adalah koordinasi, kerja sama, dan outputnya harmonisasi. Sebuah harmonisasi dari

seluruh stakeholders yang ada di daerah.

Yang pasti, tambah mantan Kassospol ABRI itu, dengan Raker ini akan tercermin adanya hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah yang terkait dengan hubungan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan, keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Karena itulah, kata Ma'ruf, kosekuensinya diperlukan penataan yang lebih sistematis tentang mekanisme hubungan kerja pusat-daerah dalam wujud koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia," tambah Mendagri.

Selain itu Mendagri juga mengingatkan, bahwa tujuan pelaksanaan Rapat Kerja Regional ini adalah: Pertama, memberi pemahaman yang utuh mengenai strategi pemantapan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, membangun sikap dan komitmen bersama dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Clean Governance

Dalam jumpa pers hari pertama, Mendagri menegaskan, dalam pengarahannya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sempat menyinggung masalah yang berkaitan dengan *clean governance*. Dalam hal ini, kata Mendagri, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, dan langkah pertama adalah pencegahan.

Oleh karena itu, pemahaman semua ketentuan, peraturan dan bagaimana mekanismenya dibahas dalam Raker. "Dalam hal tindak kejahatan korupsi, kita mengharap semua pihak paham betul adanya perbedaan antara kebijakan dan kejahatan. Tapi kalau kejahatan itu tetap terjadi dan harus diproses secara hukum, ya silakan diproses hukum," tegasnya,

Bahkan dalam kaitannya dengan proses hukum, Mendagri menyebutkan bahwa Raker ini juga dihadiri Kapolda, unsur perwakilan dari kejaksaan dan pengadilan. Jadi bila hal itu terjadi maka langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum, yang pada pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Menyangkut keluhan banyaknya undang-undang yang sentralistik yang dinilai merugikan daerah, Mendagri menjelaskan sebelum ada UU No. 32 Tahun 2004, ada UU No 20 tahun 1999 yang cenderung sentralistik. "Tolong dimengerti, sekarang kita justru sedang menuju pada pengimplementasian UU No 32 Tahun 2004 yang mengutamakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah," ujar Ma'ruf.

Salah satu kepentingan dalam dialog-dialog ini menurutnya adalah merevisi pembagian urusan kewenangan pemerintah. Pada Undang Undang yang sebelumnya malah ada kendala berupa PP 25. Dekarang pihaknya justru sedang memproses masalah itu. "Kami sudah mengawali revisi itu. Bahkan konsep revisinya sudah kami kirim ke Departemen Hukum dan HAM. Apabila ini nanti sudah disepakati maka akan ada kejelasan," tambahnya lagi.

Sebagai contoh Ma'ruf menunjuk soal investasi. Nantinya dalam hal investasi akan ada kejelasan mana yang menjadi



Suasana jumpa pers di sela-sela Raker.

kewenangan pemerintah, mana kewenangan provinsi dan mana kewenangan kota. Itulah sebabnya Mendagri berharap dari Rapat Kerja ini bisa didapatkan pemahaman yang utuh, sehingga ada semangat dan komitmen bersama untuk mengimplementasikannya. "Sudah tentu dalam pelaksanaannya nanti kita masih memerlukan pengawasan, pemantauan dan pemantauan media sangat kita perlukan," jelas Mendagri kepada pers.

Soal Beras

Sedangkan masalah beras, menurut Mendagri, esensi impor beras itu dilakukan dalam rangka menjaga keamanan pangan atau memelihara keamanan stok nasional. Secara teknis, yang paling mengetahui hal ini tentu Bulog. Merekalah yang mengadakan evaluasi bagaimana keadaan stok kita.

Kalau terjadi kekurangan, kata Mendagri, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah, upayakan pengadaan itu dari dalam negeri. Setelah diupayakan dari dalam negeri, dievaluasi lagi. "Kalau kebutuhan beras adalah X dan yang ada hanya Y, barulah dilakukan impor. Jadi fungsinya hanya untuk menjaga stabilisasi stok nasional," katanya lagi.

Menyinggung soal pemekaran wilayah, Ma'ruf menjelaskan pada dasarnya hal itu sudah dibahas di dewan otonomi daerah. Mendagri berpendapat, sebenarnya pemekaran wilayah tidak diperlukan lagi. Setidaknya untuk saat ini. Ia lebih memilih mengembangkan dan memakmurkan jumlah daerah (termasuk wilayah pemekaran) yang sekarang ada, daripada membuat daerah pemekaran baru.

Pada saatnya kalau daerah itu sudah kuat, pantas dan layak tentu saja akan dibolehkan dilakukan pemekaran. Dengan catatan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kita sudah mengevaluasi, dari sejumlah daerah yang dimekarkan malah tidak baik. Jadi bukan saya memperlambat, tapi kita waspada jangan sampai pemekaran itu justru menjadi penghambat kesejahteraan masyarakat, atau bahkan menimbulkan konflik," tegasnya. (ros/dwi)